

**PENGADILAN AGAMA SITUBONDO (401351)**

# **LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni Tahun 2018**

Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 18

Situbondo - Jawa Timur 68312

Telp. 0338-672323 Fax. 0338-673900

e-mail : [mail@pa-situbondo.go.id](mailto:mail@pa-situbondo.go.id)



# **LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA SITUBONDO**

**Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2018**

**BAGIAN ANGGARAN 005.04**

**BADAN PERADILAN AGAMA**

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 18**

**Telp. 0338-672323 Fax. 0338-673900**

**Situbondo - Jawa Timur 68312**

**e-mail : [mail@pa-situbondo.go.id](mailto:mail@pa-situbondo.go.id)**

# *KATA PENGANTAR*

# Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Situbondo adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Situbondo mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Situbondo. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Situbondo, 02 Juli 2018  
Pimpinan Pengguna Anggaran,

ABDUL KODIR, S.Ag., M.M.  
NIP.197303221998031004

# *DAFTAR ISI*

# Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	1
Pernyataan Tanggung Jawabp .....	iii
Ringkasan.....	10
I. Laporan Realisasi Anggaran .....	13
II. Neraca.....	15
III. Laporan Operasional.....	18
IV. Laporan Perubahan Ekuitas .....	20
V. Catatan atas Laporan Keuangan .....	22
A.    Penjelasan Umum.....	22
A.1.    Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Situbondo .....	22
A.2.    Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan .....	24
A.3.    Basis Akuntansi .....	24
A.4.    Dasar Pengukuran .....	24
A.5.    Kebijakan Akuntansi .....	25
B.    Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran .....	32
B.1.    Pendapatan Negara dan Hibah .....	32
B.2.    Belanja.....	33
C.    Penjelasan atas Pos-pos Neraca .....	36
C.9.    Kewajiban .....	39
Per tanggal 30 Juni 2018 terdapat kenaikan nilai Kewajiban sebesar Rp. 43.281.399 (644,20%) dari nilai per 31 Desember TA 2017. Jumlah nilai Kewajiban pada periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp. 22.500.000 , sedangkan per 31 Desember TA 2017 tercatat sebesar Rp. 0 .....	39
C.10.    Ekuitas.....	39
D.    Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional .....	39
D.1.    Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak.....	39
D.2.    Beban Pegawai .....	40
D.3.    Beban Persediaan.....	40
D.4.    Beban Barang dan Jasa .....	40
D.5.    Beban Pemeliharaan .....	41

D.6.	Beban Perjalanan Dinas.....	41
D.7.	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat.....	41
D.8.	Beban Bantuan Sosial .....	42
D.9.	Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	42
D.10.	Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih .....	42
D.11.	Beban Lain-lain.....	42
D.12.	Kegiatan Non Operasional .....	43
D.13.	Pos Luar Biasa.....	43
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas .....	43
E.1.	Ekuitas Awal.....	43
E.2.	Surplus (defisit) LO .....	43
E.3. 1.	Penyesuaian Nilai Aset .....	43
E.3. 2	Koreksi Nilai Persediaan .....	43
E.3. 3	Selisih Revaluasi Aset Tetap.....	44
E.3. 4	Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi .....	44
E.3. 5	Koreksi Lain-lain .....	44
E.4.	Transaksi Antar Entitas.....	44
E.4. 1	Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL).....	45
E.4. 2	Transfer Masuk/Transfer Keluar .....	45
E.3.	Ekuitas Akhir .....	45
F.	Pengungkapan Penting Lainnya.....	46
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca .....	46
F.2.	Pengungkapan Lain-lain.....	46
	Laporan-laporan Pendukung.....	48
	Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap .....	49
	Daftar Hibah Lang.....	52

# *PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB*

## Pengadilan Agama Situbondo

Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 18 Situbondo - Jawa Timur 68312  
Telp. 0338-672323 Fax. 0338-673900 e-mail : mail@pa-situbondo.go.id

### Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Situbondo yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Situbondo telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Situbondo, 02 Juli 2018  
Kasusa Pengguna Anggaran,

ABDUL KODIR, S.Ag., M.M.  
NIP.197303221998031004

# *RINGKASAN*

# Ringkasan

---

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Situbondo Tahun 2018 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

## 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 01 Januari 2018 s.d. 30 Juni 2018 .

Realisasi Pendapatan Negara pada 30 JUNI 2018 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 98.026.000 atau mencapai 67,09 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp. 65.765.700.

Realisasi Belanja Negara pada 30 JUNI 2018 adalah sebesar Rp. 108.400.000 atau mencapai 20,49 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 108.400.000.

## 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 30 Juni 2018 dan 2017.

Nilai Aset per 30 Juni 2018 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 27.845.120, yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp. 27.845.120; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 0; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp.0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing Rp. 22.500.000 dan Rp. 5.345.120.

## 3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari kegiatan operasional, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp 0, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp 25.334.100 sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai Rp 40.431.600. Suplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp 0 dan surplus(defisit) sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami surplus(defisit) -LO sebesar Rp. 0.

#### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2018 adalah sebesar Rp. 8.472.220 dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar Rp. 0 kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 22.207.000 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2018 adalah senilai Rp 5.345.120.

#### **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2017 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

# *I. LRA PERBANDINGAN*

# I. Laporan Realisasi Anggaran

**PENGADILAN AGAMA SITUBONDO**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2018 DAN 2017**  
*( dalam satuan Rupiah )*

	Uraian	Catatan	30 JUNI 2018			TA 2017
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
<b>A.</b>	<b>Pendapatan Negara dan Hibah</b>	<b>B.1</b>				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	98.026.000	0	0	75.445.200
	<b>Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah</b>		<b>98.026.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.445.200</b>
<b>B.</b>	<b>Belanja Negara</b>	<b>B.2</b>				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	0	0	0	0
2.	Belanja Barang	B.2.2.	108.400.000	22.207.000	20,49	50.400.000
3.	Belanja Modal	B.2.3.	0	0	0	0
	<b>Jumlah Belanja Negara</b>		<b>108.400.000</b>	<b>22.207.000</b>	<b>20,49</b>	<b>50.400.000</b>

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

## *II. NERACA PERBANDINGAN*

## II. Neraca

**PENGADILAN AGAMA SITUBONDO**  
**NERACA**  
**PER 30 Juni 2018 DAN 2017**  
*(dalam satuan Rupiah)*

URAIAN	Catatan	30 Juni 2018	31 Desember 2017
<b>ASET</b>			
<b>Aset Lancar</b>			
C.1			
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	22.500.000	0
Belanja dibayar dimuka	C.1. 2.	0	0
Persediaan	C.1. 3.	5.345.120	8.472.220
Jumlah Aset Lancar		27.845.120	8.472.220
<b>Aset Tetap</b>			
C.2			
Tanah	C.2. 1.	0	0
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	0	0
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	0	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2. 4.	0	0
Aset Tetap Lainnya	C.2. 5.	0	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2. 6.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 7.	0	0
Jumlah Aset Tetap		0	0
<b>Aset Lainnya</b>			
Aset Lain-lain		0	0
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya		0	0
Jumlah Aset Lainnya		0	0
<b>Jumlah Aset</b>		<b>27.845.120</b>	<b>8.472.200</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>			
C.5			
Utang kepada pihak ketiga	C.5. 1.	0	0

Uang Muka dari KPPN	C.5. 2.	22.500.000	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		22.500.000	0
Jumlah Kewajiban		22.500.000	0
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas Dana Lancar	C.6		
Jumlah Ekuitas Dana		5.345.120	8.472.200
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana		27.845.120	8.472.200

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

### *III. LAPORAN OPERASIONAL*

## III. Laporan Operasional

### PENGADILAN AGAMA SITUBONDO LAPORAN OPERASIONAL PER 30 Juni 2018 DAN 2017 (dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2018	31 Desember 2017
<b>Kegiatan Operasional</b>			
<b>Pendapatan</b>			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	65.765.700	75.445.200
<b>Jumlah Pendapatan</b>			
<b>Beban</b>			
Beban Pegawai	D. 2	0	0
Beban Persediaan	D. 3	3.127.100	0
Beban Barang dan Jasa	D. 4	12.927.000	29.400.000
Beban Pemeliharaan	D. 5	0	0
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	9.280.000	21.000.000
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	0	0
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
<b>Jumlah Beban</b>		<b>25.334.100</b>	<b>50.400.000</b>
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional</b>		<b>40.431.600</b>	<b>25.045.200</b>
<b>Kegiatan Non Operasional</b>			
<b>D. 12</b>			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
<b>Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

## Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa	D. 13		
Beban Luar Biasa		0	0
<b>Surplus (Defisit) Laporan Operasional</b>		<b>40.431.600</b>	<b>25.045.200</b>

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

## IV. Laporan Perubahan Ekuitas

**PENGADILAN AGAMA SITUBONDO**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**PER 30 Juni 2018 DAN 2017**  
*(dalam satuan Rupiah)*

URAIAN	Catatan	30 Juni 2018	30 Juni 2017
Ekuitas Awal	E. 1	5.345.120	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	40.431.600	25.045.200
<b>Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar</b>			
<b>Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas</b>			
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 4	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 5	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 6	0	0
Koreksi Lain-lain	E. 7	0	0
Jumlah Lain-lain		0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 8	22.207.000	(25.045.200)
<b>Ekuitas Akhir</b>		<b>5.345.120</b>	<b>0</b>

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

## *V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN*

## V. Catatan atas Laporan Keuangan

### A. Penjelasan Umum

#### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Situbondo

Pengadilan Agama Situbondo dibentuk dan berdiri secara kelembagaan bersamaan dengan berdirinya Pengadilan Agama lain berdasar Keputusan Kerajaan Belanda tanggal 19 Januari 1882 Nomor 24, Staatsblad 1882 – 152. Kedudukan Pengadilan Agama semakin kuat setelah amandemen Undang Undang Dasar Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam pasal 24 ayat (2) yang berbunyi :

*“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah konstitusi”*

Kewenangan Pengadilan Agama secara berangsur angsur bertambah dengan berkembangnya kehidupan bermasyarakat yang dituangkan dalam peraturan perundang undangan yang berlaku antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957;
2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974;
3. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989;
4. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Pengadilan Agama Situbondo mempunyai gedung sendiri sejak Tahun 1983 yaitu terletak di Jalan Argopuro 45 Situbondo, yang sebelumnya selalu berpindah pindah antara lain dengan menumpang di Masjid Al Abror, menumpang di kantor Departemen Agama, menyewa gedung di jalan Madura. Menempati gedung di Jalan Argopuro 45 Situbondo sampai tahun 1992 dan sejak tahun 1993 pindah kantor dengan menempati gedung milik Pengadilan Negeri Situbondo di Jalan Jaksa Agung Suprpto nomor 18 Situbondo.

Visi Pengadilan Agama Situbondo adalah Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Aparatur Pengadilan Agama Situbondo yang Profesional, Efektif, Efisien dan Akuntabel menuju

Badan Peradilan Indonesia yang Agung adalah Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Aparatur Pengadilan Agama Situbondo yang Profesional, Efektif, Efisien dan Akuntabel menuju Badan Peradilan Indonesia yang Agungâ

Misi Pengadilan Agama Situbondo adalah

1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan;
3. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan;
4. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Situbondo melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya kesejahteraan pegawai;
2. Meningkatnya kualitas SDM pegawai;
3. Meningkatnya mutu dan jumlah tenaga terampil dan professional;
4. Terciptanya keamanan dan kebersihan, agar lingkungan terjaga serta terpelihara dengan baik;
5. Meningkatnya koordinasi dan konsultasi ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Mahkamah Agung RI serta pihak - pihak terkait;
6. Tersedianya dan meningkatkannya sarana dan prasarana yang menunjang kelancaraan pelaksanaan tugas sehari-hari;
7. Tersedianya informasi dan adanya standarisasi biaya perkara;
8. Terwujudnya sistem pelayanan administrasi dan informasi yang akurat.

## A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

---

Laporan Keuangan Tahun 2018 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

## A.3. Basis Akuntansi

---

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

## A.4. Dasar Pengukuran

---

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat

sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

## A.5. Kebijakan Akuntansi

---

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Situbondo adalah sebagai berikut:

### (1.) Pendapatan LRA

---

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

### (2.) Pendapatan LO

---

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
  - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan

periode waktu sewa.

- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

### (3.) Belanja

---

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### (4.) Beban

---

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### (5.) Aset

---

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

### a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

#### Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan</li> <li>2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN</li> </ol>	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

#### **b. Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
  - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
  - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
  - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

### c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

#### Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

### d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

#### e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<b>Software Komputer</b>	4
<b>Franchise</b>	5
<b>Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.</b>	10
<b>Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.</b>	20
<b>Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan</b>	25
<b>Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.</b>	50
<b>Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I</b>	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

## (6.) Kewajiban

---

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

### (1.) Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

### (2.) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung..

## (7.) Ekuitas

---

- Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

### B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Realisasi  
Pendapatan  
Negara  
dan Hibah :  
Rp.0*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp. 0 atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 98.026.000. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Agama Situbondo adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

**Tabel 1 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 JUNI 2018**  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	0	0,00
2.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	98.026.000	0	0,00
3.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0,00
4.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0,00
<b>Total Pendapatan</b>		<b>98.026.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Perbandingan realisasi PNBP 30 JUNI 2018 dan 2017 disajikan dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 2 Perbandingan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2018 dan 2017**  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	30 JUNI 2018	2017	Perubahan	
				Rp	%
1.	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	65.765.700	75.445.200	(75.445.200)	64,17
2.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	0	0
3.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun	0	0	0	0

Anggaran Yang Lalu					
4.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0	0
Total Pendapatan		65.765.700	75.445.200	0	0

## B.2. Belanja

Realisasi  
Belanja  
Negara :  
Rp  
(22.207.000  
)

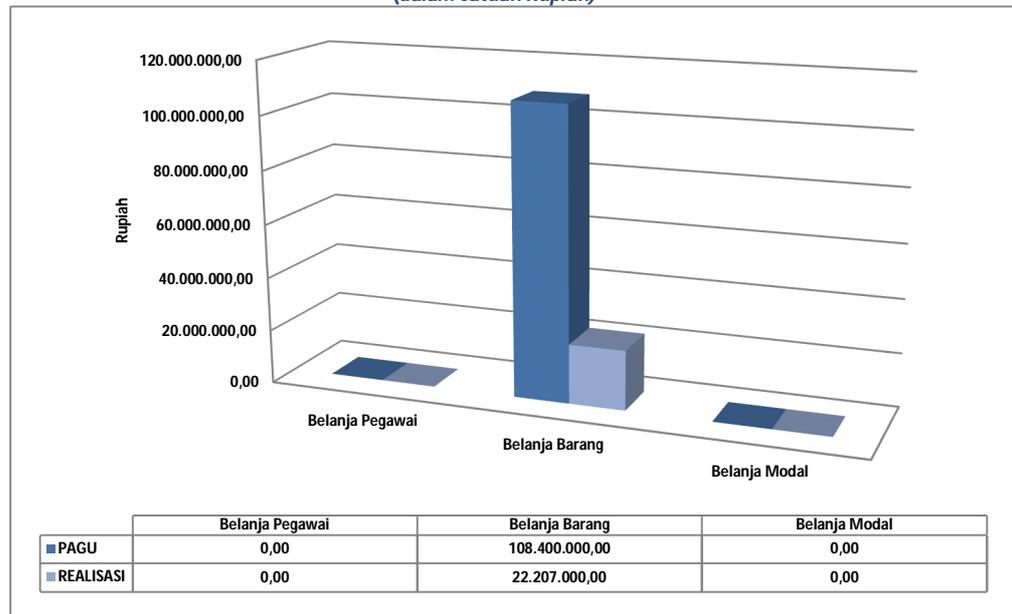
Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Situbondo per 30 JUNI 2018 adalah sebesar Rp. (22.207.000) setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 20,49% dari anggaran senilai Rp. 108.400.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada 30 JUNI 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 JUNI 2018  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 JUNI 2018		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	0	0	0
Belanja Barang	108.400.000	22.207.000	20,49
Belanja Modal	0	0	0
<b>Total Belanja Bruto</b>	<b>108.400.000</b>	<b>22.207.000</b>	<b>20,49</b>
Pengembalian Belanja		0	0
<b>Total Belanja Netto</b>	<b>108.400.000</b>	<b>22.207.000</b>	<b>20,49</b>

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 4 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 JUNI 2018**  
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) 2018 & 2017

Realisasi Belanja Negara mengalami kenaikan sebesar Rp. (8.745.009) atau sebesar (0,47) persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Kenaikan tersebut disebabkan karena:

1. Realisasi Belanja Pegawai pada tahun 2018 lebih tinggi dikarenakan adanya belanja pegawai yang berupa gaji ke 14.

Perbandingan realisasi belanja 30 JUNI 2018 dan 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 JUNI 2018 dan TA 2017**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 JUNI 2018	TA 2017	Naik (Turun)	
			Rp	%
Belanja Pegawai	0	0	0	0%
Belanja Barang	22.207.000	50.400.000	-157.331.751	-31,69%
Belanja Modal	0	0	-0	0%
<b>Total Belanja</b>	<b>22.207.000</b>	<b>50.400.000</b>	<b>8.745.009</b>	<b>0,47%</b>

### B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi  
Belanja  
Pegawai :  
Rp 0

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Agama Situbondo per 30 JUNI 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Tidak ada realisasi Belanja Pegawai karena anggaran Belanja Pegawai ada pada DIPA 401350

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

**Tabel 6 Perbandingan Belanja Pegawai per 30 JUNI 2018 dan TA 2017**  
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	REALISASI TA 2018	REALISASI TA 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	0	0	-
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	-	-	-
Belanja Honorarium	-	-	-
Belanja Lembur	-	-	-
Belanja Vakasi	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-

### B.2.2. Belanja Barang

Realisasi  
Belanja  
Barang : Rp  
22.207.000

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Agama Situbondo per 30 JUNI 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp. 22.207.000 dan Rp. 50.400.000.

Realisasi Belanja Barang 30 JUNI 2018 mengalami penurunan sebesar 31,69 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2017. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Belanja Tahun 2017 lebih cepat penyerapannya dari tahun 2018
2. Perencanaan dan realisasi belum berjalan sesuai

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7 Perbandingan Belanja Barang per 30 JUNI 2018 dan TA 2017  
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	REALISASI TA 2018	REALISASI TA 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	146.807.970	190.567.766	(22,96)
Belanja Barang Non Operasional	0	3.499.695	(100,00)
Belanja Jasa	34.979.878	37.062.477	(5,62)
Belanja Pemeliharaan	112.108.615	217.055.641	(48,35)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	33.838.019	34.225.000	(1,13)
Belanja Barang Persediaan	11.415.896	14.071.550	(18,87)
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>339.150.378</b>	<b>496.482.129</b>	<b>(31,69)</b>
Pengembalian Belanja	-	-	
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>339.150.378</b>	<b>496.482.129</b>	<b>(31,69)</b>

### B.2.3. Belanja Modal

Realisasi  
Belanja  
Modal :Rp  
0

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Agama Situbondo per 30 JUNI 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Tabel 8 Perbandingan Belanja Modal per 30 Juni 30 JUNI 2018 dan TA 2017  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 JUNI 2018	TA 2017	Perubahan	
			Rp	%
Belanja Modal Peralatan & Mesin	0	0	-0	0%
Belanja Modal Gedung & Bangunan	0	0	0	0%
Total Belanja Brutto	0	0	-0	0%
Pengembalian Belanja	0	0	0	0%
Total Belanja Netto	0	0	-0	0%

## C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

### C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di  
Bendahara  
Pengeluaran:  
Rp 22.500.000

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 22.500.000 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang

belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

**Tabel 9 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran**  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 JUNI 2018	31 Desember TA 2017
		22.500.0000	0
	<b>Jumlah</b>	<b>22.500.000</b>	<b>0</b>

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 22.500.000 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

## C.2 Persediaan

*Persediaan: Rp  
5.345.120*

Persediaan per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 5.345.120 dan Rp. 8.472.220. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

**Tabel 10 Rincian Persediaan per 31 Desember 30 JUNI 2018 dan 31 Desember 2017**

No.	Uraian	30 Juni 2018	31 Desember 2017
1	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.345.120	8.472.220
2	Amunisi	0	0
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
4	Suku Cadang	0	0
5	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0

6	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
7	Bahan Baku	0	0
8	Barang dalam Proses	0	0
9	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
10	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
11	Persediaan lainnya	0	0
<b>Total</b>		<b>5.345.120</b>	<b>8.472.220</b>

### C.3 Tanah

*Tanah: Rp 0* Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

### C.4 Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan Mesin : Rp 0* Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

### C.5 Gedung dan Bangunan

*Gedung dan Bangunan : Rp 0* Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

### C.6 Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap Lainnya: Rp 0* Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

### C.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi Penyusutan Aset tetap : Rp 0* Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing Rp0 dan Rp 0

### C.8. Aset Lainnya

*Aset Lainnya Rp 0* Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah Rp 0 dan Rp 0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

### C.9. Kewajiban

*Kewajiban Rp 22.500.000*

Per tanggal 30 Juni 2018 terdapat kenaikan nilai Kewajiban sebesar Rp. 43.281.399 (644,20%) dari nilai per 31 Desember TA 2017. Jumlah nilai Kewajiban pada periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp. 22.500.000 , sedangkan per 31 Desember TA 2017 tercatat sebesar Rp. 0

### C.10. Ekuitas

*Ekuitas: Rp 5.345.120*

Ekuitas per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 5.345.120 dan Rp 0. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

### D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

*Pendapatan PNBPNP : Rp.65.765.700*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp.65.765.700 dan Rp 75.445.200. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 36 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPNP per 30 JUNI 2018  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
-----	--------	---------------------	-----------	---

1. Pendapatan Ongkos Perkara	64.620.000	29.670.000	0%
2. Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	33.406.000	36.095.700	
<b>Total Pendapatan</b>	<b>98.026.000</b>	<b>65.765.700</b>	<b>0%</b>

## D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai  
: Rp 0

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

## D.3. Beban Persediaan

Beban Persediaan : Rp  
3.127.100

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 3.127.100 dan Rp 0. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 38 Rincian Beban Persediaan per 30 JUNI 2018 dan TA 2017  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 JUNI 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	3.127.100	0	3.127.100	100%
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	-	-	-	0%
Beban Persediaan Suku Cadang	-	-	-	0%
Beban Persediaan Lainnya	-	-	-	0%
<b>Total Beban Persediaan</b>	<b>3.127.100</b>	<b>0</b>	<b>3.127.100</b>	<b>100%</b>

## D.4. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa : Rp  
12.927.000

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017

adalah masing-masing sebesar Rp 12.927.000 dan Rp 29.400.000 Beban barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 39 Rincian Beban Jasa per 30 JUNI 2018 dan TA 2017  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 JUNI 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Barang Operasional lainnya	5.400.000	3.600.000	1.800.000	50%
Beban Jasa Konsultan	7.527.000	25.800.000	(18.273.000)	70,82%
<b>Total Beban Jasa</b>	<b>12.927.000</b>	<b>29.400.000</b>	<b>(16.473.000)</b>	<b>-20,82%</b>

## D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban Pemeliharaan: Rp 0*

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0 Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

## D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban Perjalanan Dinas : Rp 9.280.000*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 9.280.000 dan Rp 21.000.000 Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 41 Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 JUNI 2018 dan TA 2017  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 JUNI 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	9.280.000	21.000.000	(11.720.000)	55,80%
<b>Total Beban Perjalanan Dinas</b>	<b>9.280.000</b>	<b>21.000.000</b>	<b>(11.720.000)</b>	<b>55,80%</b>

## D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang untuk Diserahkan kepada*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada

*Masyarakat : Rp0* 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015.

## D.8. Beban Bantuan Sosial

*Beban Bantuan Sosial : Rp0* Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

## D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban Penyusutan dan Amortisasi : Rp0* Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0 Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

## D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

*Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih : Rp0* Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

## D.11. Beban Lain-lain

*Beban Lain-Lain : Rp0* Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

## D.12. Kegiatan Non Operasional

*Beban Kegiatan Non Operasional : Rp0* Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

## D.13. Pos Luar Biasa

*Beban Pos Luar Biasa : Rp0* Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

## E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

### E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 5.345.120 dan Rp 0

### E.2. Surplus (defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp 40.431.600 dan Rp 25.045.200 Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

### E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0 Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir

### E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena

kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 0 Dan Rp 0

### E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

- Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0

### E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

- Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0 Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

### E.3.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0 Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

## E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp (43.558.700) dan Rp (25.045.200)

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

**Tabel 51 Rincian Nilai Transaksi antar Entitas  
per 30 JUNI 2018  
(dalam satuan Rupiah)**

Transaksi antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(65.765.700)
Ditagihkan ke Entitas Lain	22.207.000
Transfer Masuk	0

Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Pengesahan Pengembalian hibah Langsung	0
<b>Jumlah</b>	<b>(43.558.700)</b>

#### E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2018, DDEL sebesar Rp 0 sedangkan DKEL sebesar Rp 0

#### E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2018, sebesar 0 dari total 0 yang diterima sepanjang tahun 2018.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2018, adalah Rp0.

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2018 adalah sebagai berikut:

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1	-	0	
2	-	0	

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2017 disajikan pada lampiran

#### E.3. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 5.345.120 dan Rp 0

## F. Pengungkapan Penting Lainnya

### F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

1. Terdapat Temuan yang harus dilakukan Revisi atau Perubahan DIPA yang berupa Akun Estimasi Pendapatan Pengadilan Agama Situbondo

### F.2. Pengungkapan Lain-lain

#### F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak ada temuan bpk

#### F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Tidak ada informasi akrual.

#### F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Situbondo adalah:

1. PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. A/C 009001000531305 a.n. RPL 035 PA SITUBONDO UTK PDT BIAAYA PERKARA yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2018 sebesar Rp. 150.027.816.
2. BRI CABANG SITUBONDO A/C 00000090-01-000625-30-8 a.n. BPg 035 PENGADILAN AGAMA SITUBONDO (401351) yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILAG dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2018 sebesar Rp.0.

#### F.2.4. Revisi DIPA

Informasi mengenai revisi DIPA dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Revisi DIPA yang akan dilaksanakan setelah tanggal Neraca dikarenakan adanya temuan yang harus merubah Akun Estimasi Pendapatan pada DIPA sehingga terjadi perubahan halaman 3 DIPA

### **F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB**

---

Informasi mengenai Ralat SPM, SP2D, SSBP, SSPB:

1. Tidak Terjadi Ralat SPM

### **F.2.6. Catatan Penting Lainnya**

---

1. Terdapat Perubahan Akun Pendapatan dari akun 423415 menjadi 425233 dan dari akun 423419 menjadi 425239

# LAPORAN PENDUKUNG

---

*A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN,  
AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN  
NILAI BUKU ASET TETAP*

## Pengadilan Agama Situbondo

### Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/Amortisasi, Akumulasi Penyusutan/Amortisasi, dan Nilai Buku Aset Tetap untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2018

No.	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
				Per 31 Desember 2017	2018	Per 30 Juni 2018	Per 30 Juni 2018
<b>A.</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>		<b>1.810.107.484</b>	<b>1.123.502.450</b>	<b>146.428.396</b>		<b>540.176.638</b>
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	424.308.634	373.486.946	25.410.844		25.410.844
2	Alat Kantor	5	94.489.949	56.269.949	6.904.000		31.316.000
3	Alat Rumah Tangga	5	668.812.151	316.100.117	56.350.452		296.361.582
4	Alat Studio	5	12.902.600	5.242.600	1.532.000		6.128.000
5	Alat Komunikasi	5	23.750.750	8.660.750	1.509.000		13.581.000
6	Alat Khusus Kepolisian	4					-
7	Komputer Unit	4	495.693.700	333.670.638	35.718.100		126.304.962
8	Peralatan Komputer	4	89.399.700	29.321.450	19.004.000		41.074.250
9	Peralatan Olah Raga	3	750.000	750.000			-
<b>B.</b>	<b>Gedung dan Bangunan</b>		<b>0</b>	<b>521.825.521</b>	<b>116.924.061</b>	<b>16.991.415</b>	<b>5.096.741.603</b>
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	5.675.772.600	500.559.862	113.563.797	16.991.415	5.044.657.526
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	76.710.000	21.265.659	3.360.264		52.084.077

C.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan			1.117.856		(2.235.712)	-
D.	Aset Tetap Lainnya						
	1 Bahan Perpustakaan Tercetak	-					
E.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan						
	1 Alat Angkutan Darat Bermotor	7					
	2 Alat Kantor	5	13.938.926	13.938.926			-
	3 Alat Rumah Tangga	5	15.683.092	15.683.092			-
	4 Alat Komunikasi	5	93.750	93.750			-
	5 Komputer Unit	4	26.751.850	26.751.850			-
	6 Peralatan Komputer	4	3.626.205	3.626.205			-
	7 Bahan Perpustakaan Tercetak	-					-
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap			7.622.683.907	1.706.539.650	264.470.313	14.755.703
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya			7.622.683.907	1.706.539.650	264.470.313	14.755.703

**Pengadilan Agama Situbondo**  
**Daftar Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa**  
**untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2018**

No.	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
						Nilai	Keterangan
		U					
1.	PT. BRI TBK	BARANG		40.600.000	40.600.000	0	
			Jumlah :	40.600.000	40.600.000	0	

***Halaman ini bukan bagian dari laporan keuangan.***

***Silahkan ganti halaman ini dengan laporan realisasi belanja akrual (dari menu neraca akrual aplikasi komdanas)***



Catatan atas  
Laporan Keuangan

005

01

0500

401350

APC

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember

{halaman ini untuk cover di samping/punggung saat dijilid}

DRAFT